

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan menjadi salah satu fenomena sosial yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Kemiskinan merupakan sebuah dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sosial dan ekonomi yang tidak ditangani secara serius dan terstruktur. Permasalahan tersebut juga merupakan akibat dari perencanaan pemukiman yang tidak sesuai dengan kebutuhan maupun aspirasi masyarakat, sehingga belum bisa mengoptimalkan manfaat dari potensi sekitar. Oleh karenanya, problematika terkait kemiskinan di Indonesia memiliki pengaruh yang buruk dengan meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota-kota besar (Setiawan et al., 2023).

Umumnya kemiskinan diakibatkan juga dari ketidakberdayaan masyarakat usia kerja dalam memperoleh maupun mempertahankan pekerjaan yang dimilikinya, sebab krisis ekonomi sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur. Soetomo (2008), menyatakan bahwa kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor individu, yakni kemalasan serta ketidakmampuan dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Penyebab terbesar dari kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah (Setiawan et al., 2023). Faktor dari kemiskinan menyebabkan timbulnya fenomena sosial gelandangan dan pengemis (gepeng).

Gepeng atau gelandangan dan pengemis merupakan salah satu fenomena yang masih sering ditemukan sampai saat di kota-kota besar. Hal ini merupakan

salah satu dampak dari kegiatan urbanisasi yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berangkat dari desa dengan harapan akan memiliki kehidupan yang lebih layak di kota namun tidak didukung dengan memiliki keahlian dan tidak di dukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai yang pada akhirnya malah menyebabkan mereka harus memilih pekerjaannya sebagai pengemis.

Fenomena gelandangan dan pengemis telah menjadi problematika di sebagian wilayah Indonesia, termasuk kota Jambi. Ibu kota Provinsi Jambi ini mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga banyak penduduk dari desa maupun kota lainnya memilih untuk mengadu nasib di kota Jambi. Walaupun mereka tidak mempunyai bekal keterampilan, keahlian, pendidikan, maupun modal yang memadai. Akibatnya sebagian besar dari mereka tidak memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga terpaksa menjadi anak jalanan dan gepeng (Andaresta, 2023).

Jumat Berkah merupakan istilah yang merujuk pada hari Jumat sebagai waktu yang penuh keberkahan bagi umat Islam. Hari ini dianggap istimewa karena berbagai keutamaan yang terkandung di dalamnya, termasuk anjuran untuk memperbanyak ibadah, doa, dan amal kebaikan. Hari jumat dianggap sebagai hari yang paling mulia dalam Islam, di mana umat Islam dianjurkan untuk melakukan lebih banyak amal kebaikan. Pada hari ini, banyak umat Islam memanfaatkan kesempatan untuk bersedekah, baik berupa uang, makanan, atau bantuan kepada yang membutuhkan (ANTARA, 2024).

Gelandangan dan pengemis di kota Jambi mulai memanfaatkan momen jumat berkah yang sering terjadi setiap hari jumat untuk mereka jadikan sebagai cara meminta dan mengemis dengan lebih mudah. Pada hari ini, banyak Masyarakat

berbondong-bondong untuk memberikan bantuan kepada gelandangan dan pengemis yang memang sengaja menunggu santunan berupa makanan, pakaian dan sejumlah uang. Salah satu pemicu utama banyaknya gepeng di sudut-sudut kota Jambi karena sifat dermawan Masyarakat Jambi yang masih memberikan sedekah atau santunan kepada para gepeng (Ahmadi, 2024).

Hal ini sejalan dengan berita yang dilansir dari Jambiupdate.co yakni, menurut kepala dinas sosial kota Jambi, Yunita Indrawati, mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) di kota Jambi di sebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utama adalah budaya masyarakat yang masih dermawan dalam memberikan sedekah (Jambiupdate.co, 2024)

Jumat berkah merupakan salah satu kegiatan positif yang memperlihatkan kepedulian terhadap sesama manusia, memotifasi masyarakat untuk berbuat baik, menumbuhkan nilai religius dan karakter positif. Namun tidak hanya memiliki dampak positif saja, kegiatan jumat berkah juga memiliki dampak negatif jika terus di biarkan maka jumlah gelandangan dan pengemis jumat berkah akan terus meningkat dan membuat mereka menjadi lebih konsumtif dan bergantung pada bantuan rutin, sehingga mengurangi motivasi untuk mandiri atau berusaha sendiri. Berikut merupakan rekapitulasi data jumlah gepeng dan anak jalanan 2021-2024 yang diperoleh peneliti dari Dinas Sosial Kota Jambi:

Tabel 1. 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Jambi Tahun 2021-2024

No.	NAMA	JUMLAH			
		2021	2022	2023	2024
1.	GEPENG	232	58	126	69

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Jambi 2024

Tabel diatas menunjukkan peningkatan total gelandangan dan pengemis selama 2021-2024 di kota Jambi. Hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan, misalnya ekonomi dan lingkungan sosial yang sangat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan total gepeng tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, sebab banyak orang akan berasumsi bahwa keberadaan gepeng akan mengusik keamanan maupun keindahan kota Jambi.

Jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang semakin banyak terlihat di sejumlah lokasi kota Jambi menjadi perhatian serius warga dan pemerintah. Sekitar daerah jembatan Makalam, serta beberapa simpang jalan lainnya menjadi pusat berkumpulnya para gelandangan dan pengemis (Jambilink, 2024). Situasi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga dan pengunjung pasar, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi gangguan keamanan.

Dilansir dari salah satu berita yakni Jambikota.go.id wali kota Jambi Maulana mengatakan bahwa "Penjangkauan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini perlu dilakukan khususnya gepeng dan anjal yang meresahkan pengguna jalan. Karena hal itu bisa membahayakan tidak hanya bagi diri mereka pribadi, namun juga bagi pengendara khususnya di simpang-simpang lampu merah" (Jambikota.go.id, 2025).

Tingginya angka gelandangan dan pengemis di kota Jambi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan kota. Mereka seringkali hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa tempat tinggal yang layak dan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Kehadiran mereka juga seringkali dihubungkan dengan peningkatan angka kriminalitas dan ketidakamanan di beberapa daerah. Selain itu, masalah kesehatan seperti penyakit menular dan kekurangan gizi juga menjadi perhatian serius akibat kondisi hidup

yang buruk. Dalam jangka panjang, keberadaan gelandangan dan pengemis dapat merusak citra kota dan menjadi wajah keseharian dari kota Jambi. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial juga menjadi faktor pendorong konflik sosial. Adanya kesenjangan dalam distribusi kekayaan, pendidikan, atau akses terhadap sumber daya dapat menciptakan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat (Fatriani, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Budi Wahyudi selaku Koordinator Rehabilitasi Sosial mengatakan bahwa pemerintah kota Jambi sadar akan fenomena pengemis jumat berkah yang tengah menjamur di lingkungan Kota Jambi. Beliau juga menyampaikan bahwa Upaya yang dapat di berikat oleh mereka hanya sebatas memberikan himbauan kepada Masyarakat kota Jambi agar tidak lagi memberi atau bersedekah secara langsung terutama pada hari jumat. Dengan tidak memberikan sumbangan atau sedekah secara langsung kepada para pengemis khususnya di hari jumat, itu membuat mereka tidak lagi menunggu di sekitar persimpangan ataupun beberapa titik pusat keramaian di kota Jambi. Namun, beliau juga mengakui bahwa untuk saat ini mereka belum malakukan Razia atau penertiban secara tegas terhadap para pengemis jumat berkah. Hal ini karena pengemis yang menunggu mendapatkan dampak dari kegiatan jumat berkah yang dilakukan oleh masyarakat kota Jambi ternyata ada juga dari kalangan Masyarakat biasa, sehingga menyulitkan tim Razia untuk melakukan penjangkauan.

Dari data yang telah dipaparkan di atas, maka dari permasalahan mengenai gelandangan dan pengemis di kota Jambi, masalah pengemis jumat berkah masih menjadi perhatian serius. Tingginya jumlah mereka mengindikasikan adanya

masalah sosial dan ekonomi yang perlu ditangani lebih lanjut. Kehadiran mereka sering kali menimbulkan berbagai masalah, ketertiban umum, dan citra kota.

Isu mengenai pengemis jumat berkah penting untuk diangkat karena merupakan bagian dari masyarakat yang rentan dan membutuhkan perlindungan serta perhatian khusus. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dengan mengatasi masalah pengemis jumat berkah akan mencerminkan komitmen dan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap isu sosial yang ada di lingkungan sekitar, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemerintah kota Jambi mengeluarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng), dan Anak Jalanan. Peraturan ini dikeluarkan semata-mata untuk menertibkan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Jambi.

Pemerintah kota juga terus berupaya dalam menangani persoalan gelandangan dan pengemis yang semakin menjamur di kota Jambi dengan membentuk tim satgas yang terdiri dari dinas sosial kota Jambi dan satuan polisi pamong praja kota Jambi. Oleh karenanya penting untuk melihat responsivitas pemerintah kota Jambi dalam penganggulangan gepeng. Dari masalah diatas penulis melakukan beberapa kajian awal untuk menemukan permasalahan yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian mengenai Responsivitas Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanggulangan Gepeng (Fenomena Jumat Berkah) diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Faisah dkk (Faisah et al., 2015), berfokus pada responsivitas pemerintah kota Makassar terhadap perlindungan anak anjal dan gepeng. Hasil temuan menunjukkan responsivitas pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan anak cukup responsif, namun demikian responsivitas tersebut belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan mengenali kebutuhan anak, prioritas pelayanan, dan pengembangan program perlindungan anak masih terbatas, karena pemerintah masih bertumpu pada Lembaga-lembaga lain yang peduli pada permasalahan perlindungan anak. Dengan demikian Langkah yang ditempuh sehubungan dengan perlindungan anak adalah meningkatkan pemahaman perlindungan Anak dari aparat pemerintah, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Yayasan Penanggulangan Anak Jalanan dan sebagainya.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veronica Sri Astuti N dkk (N et al., 2023). Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Sosial PPPA dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. Dengan hasil temuan bahwa Dinas Sosial PPPA dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo sudah sesuai dengan peraturan Walikota Probolinggo nomor 38 tahun 2019 dengan tersedianya rumah singgah sementara (Shelter) termasuk pengelolanya sebagai tempat pembinaan para Gelandangan Pengemis (GEPENG), koordinasi bersama Satpol PP. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dalam penanganan Gelandangan Pengemis (GEPENG) adalah, Masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbaun larangan memberikan sedekah kepada pengemis, Sehingga

membuat semakin menjamurnya para Gelandangan Pengemis (GEPENG) di kota Probolinggo. Terbatasnya rumah singgah sementara (Shelter) bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) sehingga daya tampung yang kurang memadai dari pada jumlah Gelandangan Pengemis (GEPENG) itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani (Febriani, 2023). Penelitian ini berfokus pada kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal, terdapat beberapa faktor penghambatnya yaitu, kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang relatif banyak, kesadaran masyarakat yang minim perihal ini yang membuat gelandangan dan pengemis masih betah melakukan aktivitas tersebut karena mendapat belas kasihan dari masyarakat. Kemudian, kurangnya fasilitas dari Dinas Sosial dalam program yang membuat gelandangan dan pengemis tidak betah saat diberi sosialisasi serta arahan.

Penelitian oleh Jaine Christine Andu dkk (Andu et al., 2023). Penelitian ini berfokus pada kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam merehabilitasi gelandangan dan pengemis di kota Manado. Hasil temuan yaitu, pemerintah telah melaksanakan prosedur penanganan serta program bantuan kepada gelandangan dan pengemis kota Manado, namun belum terlaksana dengan optimal. Hal itu disebabkan oleh anggaran yang belum ditetapkan dan disediakan oleh pemerintah, dikarenakan pasca pandemi covid 19 yang berimbas pada beberapa instansi pemerintahan salah satunya yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado.

Selanjutnya penelitian terdahulu oleh Dina Alpia Riza (Dina Alpia Riza, 2018). Penelitian ini berfokus pada implementasi pelaksanaan perda no.47 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Hasil studi menunjukkan bahwa upaya penertiban gelandangan serta pengemis di Kota Jambi telah diusahakan semaksimal mungkin, tetapi belum bisa dinyatakan efektif. Berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan penertiban tersebut antara lain faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Dea Andaresta (Andaresta, 2023). Penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan wali kota Jambi no.29 tahun 2016 tentang penanganan gepeng dan anjal. Hasil studi menunjukkan pelaksanaan peraturan tersebut mencakup upaya preventif seperti pemantauan dan patroli rutin pada titik rawan anjal dan gepeng, serta sosialisasi langsung ataupun tak langsung. Upaya selanjutnya yakni represif dengan cara patroli maupun razia guna mengamankan anjal dan gepeng, serta memberikan rehabilitasi melalui pemberdayaan hingga pembinaan mental, keterampilan, sosial, sampai dengan penyaluran. Namun, usaha pemberdayaan hanya dilaksanakan di 2020, sedangkan 2021-2022 tidak ada pemberdayaan yang dilaksanakan, oleh karenanya implementasi kebijakan belum optimal. Kendala pelaksanaan peraturan adalah rendahnya kesadaran masyarakat, kemalasan anjal dan gepeng untuk bekerja, kurangnya kejelasan batasan terkait anjal dalam kebijakan berlaku, hingga bantuan modal yang minim bagi gepeng yang telah mendapatkan rehabilitasi serta pemberdayaan.

Penelitian terdahulu oleh Ari Dyah Sinta dkk (Ari Dyah Sinta, Shulhan, 2024). Penelitian ini berfokus pada adanya narasi agama di dalam diri dan

keinginan untuk mensejahterakan Masyarakat menjadi penyebab utama mengapa ingin membantu. Kemudian bantuan dilembagakan, muncul ketidakpercayaan dalam mengelola bantuan, sehingga ada beberapa pemberi yang langsung memberikan bantuan, misalnya yang dilakukan pemilik UMKM yang melakukan aksi “Jumat Berkah”. Riset ini mengkaji terkait transformasi dari aktivitas berderma dengan mengambil fenomena “Jumat Berkah” yang dilakukan para UMKM.

Penelitian oleh Panji Sastrawan (Sastrawan, 2023), menunjukkan bahwa Terdapat tiga pembahasan yaitu paradigma filantropi, pendanaan atau keuangan, dan membangun citra atau branding. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa lembaga filantropi sosial di Indonesia berada pada kuadran 4 atau ST. kuadran ini menjelaskan keadaan lembaga filantropi harus mengurangi ancaman dan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya. Strategi yang dianjurkan adalah strategi diversifikasi, dimana lembaga filantropi sosial harus melakukan pengembangan strategi yang memperluas jangkauan masyarakat melalui berbagai program. Secara keseluruhan Lembaga Filantropi di Indonesia dengan melihat teori dari Hunger (2009) masih terkategori pada tahap awal yaitu Basic financial planning, yaitu perencanaan organisasi/perusahaan yang didasarkan pada perencanaan keuangan.

Urgensi penelitian terhadap fenomena pengemis Jumat Berkah di Kota Jambi sangat penting karena fenomena ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di ruang publik, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial, gangguan ketertiban, dan permasalahan kebersihan kota. Praktik berbagi yang mulanya bertujuan mulia justru berpotensi memperkuat siklus ketergantungan dan menarik pengemis musiman, termasuk anak-anak, untuk

memanfaatkan momen tersebut demi mendapatkan bantuan instan, sehingga mengabaikan upaya pemberdayaan dan pendidikan. Selain itu, meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya penertiban dan pembinaan, fenomena ini terus berulang akibat keterbatasan fasilitas, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan bantuan secara tepat. Penelitian ini menjadi krusial untuk memberikan rekomendasi berbasis data bagi perbaikan kebijakan sosial, penguatan regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar penanganan pengemis di Kota Jambi dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan, keberadaan gepeng khususnya pada hari jumat harus diakui dalam lingkungan sosial dan masyarakat. Pemerintah tidak boleh menutup mata akan keberadaan gelandangan dan pengemis karna mereka juga termasuk warga negara Indonesia dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membantu memperbaiki taraf kehidupan sosial gepeng di tingkatan sosial dan dapat diterima di masyarakat. Pemerintah telah membuat peraturan mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di kota Jambi. Namun meskipun demikian, sampai hari ini masih banyak saja gelandangan, pengemis dan anak jalanan di kota Jambi. Oleh karena itu penting untuk melihat responsivitas pemerintah kota terhadap permasalahan gepeng di kota Jambi. Maka timbul pertanyaan bagaimana responsivitas pemerintah kota terkait permasalahan ini. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “RESPONSIVITAS PEMERINTAH KOTA JAMBI DALAM PENANGANAN FENOMENA PENGEMIS JUMAT BERKAH”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Jambi dalam merespon fenomena pengemis jumat berkah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya pemerintah Kota Jambi dalam merespon fenomena pengemis jumat berkah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas, dapat diketahui manfaat dari hasil penelitian ini, baik bagi para pembaca maupun penulis sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai kondisi sosial di lingkungan masyarakat terkait penanganan fenomena pengemis jumat berkah.
- b. Bagi peneliti, sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang di pelajari, dan sebagai sarana pengembangan kemampuan pada penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam melihat serta mengevaluasi program dalam penanganan gepeng. Pemerintah juga dapat melakukan pembaharuan serta meningkatkan inovasi serta membuat kebijakan yang lebih baik.
- b. Bagi gelandangan dan pengemis penelitian ini dapat membantu mereka dalam memahami peran pemerintah dalam mengurus setiap masyarakat Indonesia, termasuk hak dan kewajiban mereka, membantu meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis melalui peraturan walikota ataupun perda yang terencana dan tertata, dan meningkatkan akses ke fasilitas.
- c. Bagi masyarakat, Meningkatkan ketertiban dengan penataan gelandangan dan pengemis yang baik dapat meningkatkan ketertiban dan keindahan kota, dan Meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktifitas ataupun sekedar refresing saja di kota Jambi.

1.5 Landasan Teori

Teori Responsivitas

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan

kegagalan organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula (Rismawati et al., 2015).

Santoso (2008: 131) mengatakan bahwa responsivitas adalah kemampuan lembaga publik merespons kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan basic need (kebutuhan dasar) serta HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya) (Setianingrum & Tsalatsa, 2016). Responsivitas menurut Tangkisilan (2005:177) menjelaskan bahwa responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Kemampuan ditunjukkan dengan pembuatan regulasi untuk menyelesaikan masalah (Nurani et al., 2015).

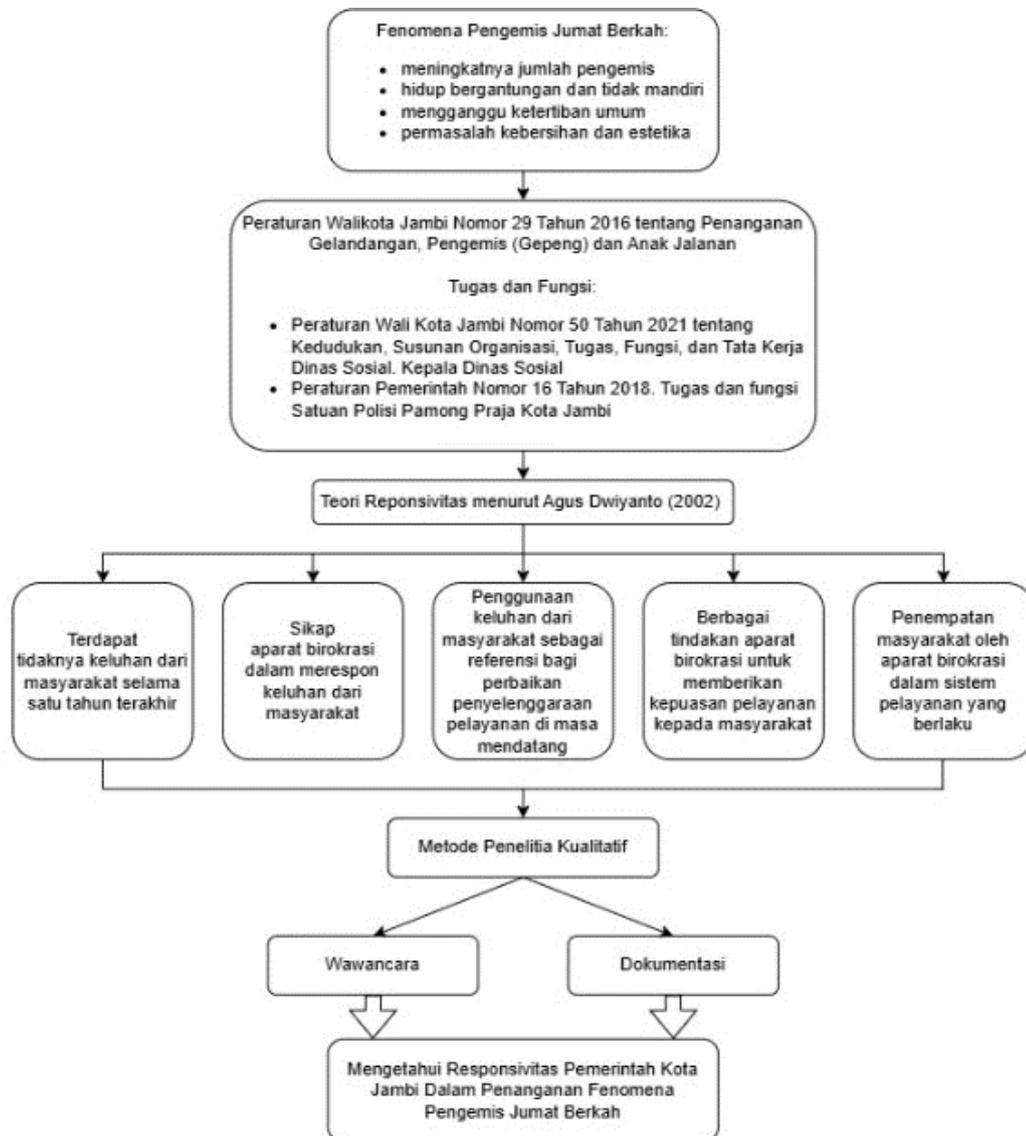
Zeithaml, dkk dalam Rasdiana dan Riski Ramadani (Rasdiana & Riski Ramadani, 2021), menjelaskan secara rinci dan menyebutkan bahwa responsivitas termasuk ke dalam salah satu dimensi kualitas pelayanan publik, dimana responsivitas sendiri terdiri dari beberapa indikator, yaitu Kemampuan Merespon, Kecepatan Melayani, Ketepatan Melayani, Kecermatan Melayani, Ketepatan Waktu, dan Kemampuan Menanggapi Keluhan.

Menurut Agus Dwiyanto, (Dwiyanto, 2006) Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkan ke dalam program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan. Agus Dwiyanto mengemukakan indikator dari responsivitas sebagai berikut:

1. Terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir
2. Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa
3. Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan di masa mendatang
4. Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa
5. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas, peneliti mengangkat masalah dari munculnya fenomena pengemis jumat berkah yang semakin menjamur di kota Jambi. Dengan adanya peraturan walikota Jambi no 29 tahun 2016 tentang penanganan gepeng dan anjalseharus bisa di jadikan landasan untuk melakukan penertiban gelandangan jumat berkah. Oleh karena itu peneliti ingin melihat

responsivitas dari pemerintah kota Jambi dalam merespon fenomena pengemis jumat berkah di kota Jambi. teori yang digunakan adalah teori responsivitas menurut Agus Dwiyanto dimana dalam teori terdapat beberapa indikator yang bisa menentukan keberhasilan dari penelitian ini. Indikator ini tentu akan memberikan Gambaran yang lebih jelas mengenai hasil dari fenomena suatu kondisi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari metodologi kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara menyeluruh dan deskriptif dengan kata-kata dan bahasa secara alami. Dengan menggunakan metode alami, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2017)

Penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus merupakan bentuk penelitian yang menyelidiki suatu isu dalam batasan-batasan tertentu, mengumpulkan data secara menyeluruh, dan mengintegrasikan berbagai sumber informasi. Dengan penerapan metode ini, diharapkan peneliti mampu mengumpulkan data secara detail serta memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang responsivitas pemerintah kota Jambi dalam merespon fenomena pengemis jumat berkah.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi tepatnya pada Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena penanganan Pengemis merupakan tugas maupun wewenang dari dinas Sosial dan Satpol PP, dan unit kerja yang mengawasi peningkatan jumlah pengemis. Peneliti juga melakukan observasi langsung dan wawancara dengan turun ke daerah yang memiliki potensi banyak terdapat dan terlihat aktivitas para pengemis yang menunggu momen jumat berkah di Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai batas masalah untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian. Sebagai bagian dari proses melihat atau mengukur masalah penelitian. Fokus penelitian ini yaitu melihat bagaimana responsivitas pemerintah kota terkait penanganan permasalahan fenomena pengemis jumat berkah dari tahun 2024-per april 2025.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data didefinisikan sebagai sebuah subjek dari mana data dapat di peroleh untuk sebuah penelitian. Untuk mengetahui bagaimana responsivitas pemerintah kota Jambi dalam merespon fenomena pengemis jumat berkah , maka di perlukan sumber data. Data primer dan sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan ataupun pertanyaan penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data ini dihasilkan melalui proses pengumpulan data secara langsung, seperti wawancara, survei, atau penelitian lapangan. Sumber data primer sering digunakan dalam penelitian untuk memastikan keaslian dan relevansi data dengan tujuan penelitian.

b. Data Skunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh seseorang penelitian secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya (Pakpahan et al., 2021). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data yang terdapat pada rencana strategi dinas sosial, keputusan kepala dinas sosial kota Jambi no.24 tahun 2025, surat perintah tugas satpol pp tahun 2025, peraturan walikota Jambi no.29 tahun 2016, peraturan walikota Jambi no.50 tahun 2021, dan peraturan pemerintah no.16 tahun 2018 serta menggunakan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini terkait kebijakan pemerintah daerah, dan aksi kegiatan jumat berkah.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian disebut informan (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2017).

Informan biasanya dipilih karena mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik atau fenomena yang sedang diteliti. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Adapun menurut Sugiyono (2012:54) di dalam Nursyam Ramadhani (Ramadhani, 2018) teknik penentuan informan seperti ini, disebut dengan istilah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas. Dapat kita lihat sebuah persyaratan dalam menentukan informan, agar didapatnya informan yang tepat dalam di dalam penelitian ini sehingga penelitian ini menjadi kredibel karena informan yang tepat.

Peneliti memilih beberapa informan yang relevan dengan subjek penelitian, seperti:

Tabel 1. 2. Narasumber

Narasumber	Alasan
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Jambi	Karena Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap penanganan pengemis di kota Jambi.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Kota Jambi	Karena Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah, termasuk dalam penertiban pengemis di kota Jambi.
Masyarakat Kota Jambi	Ingin melihat respon dan tanggapan Masyarakat kota Jambi yang ikut serta melakukan kegiatan berbagi dalam rangka Jumat Berkah.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara atau langkah yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah dan kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan hasil penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode paling umum untuk mengumpulkan data kualitatif dalam penelitian. Menurut Bog dan Biklen, wawancara adalah dialog antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau penjelasan yang diarahkan oleh salah satu pihak (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2017). Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan data yang mendalam mengenai suatu topik atau 24 masalah yang diangkat selama proses penelitian. Dengan kata lain, wawancara adalah metode untuk memverifikasi data atau informasi yang telah diperoleh. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, yang memastikan bahwa peneliti akan mendapatkan informasi yang akurat jika mereka sudah mengetahuinya sebelumnya. Selain itu, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan pemikiran yang lebih terbuka tentang masalah yang dihadapi penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumen juga digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Banyak sekali dokumen yang dipakai oleh peneliti

kualitatif. Tugas utama adalah mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara untuk memperolehnya (Barlian, 2016). Dokumentasi dapat mencakup berbagai jenis bahan, seperti laporan resmi, artikel ilmiah, buku, dan foto-foto yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini sangat berguna untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi, karena dapat memberikan bukti konkret dan referensi yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa data yang dapat digunakan dalam penelitian ini di antaranya, rencana strategi dinas sosial, keputusan kepala dinas sosial kota Jambi no.24 tahun 2025, surat perintah tugas satpol pp tahun 2025, peraturan walikota Jambi no.29 tahun 2016, peraturan walikota Jambi no.50 tahun 2021, dan peraturan pemerintah no.16 tahun 2018.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang berarti memberikan analisis sistematis dan faktual. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata dari subjek penelitian secara tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif bias sangat rumit dan tumpang tindih karena data yang dikumpulkan tidak hanya berfokus pada masalah yang telah ditentukan tetapi juga dapat berubah sesuai dengan keadaan lapangan (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2017). Proses pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap:

a. Reduksi Data

Untuk mengurangi data atau merangkum informasi, hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil kesimpulan harus dirangkum atau diabstrakkan. Dengan kata lain, peneliti melakukan proses reduksi data secara konsisten selama proses penggalian data untuk menghasilkan catatan inti dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan memilih dan memilih data tentang penanganan pengemis di kota Jambi lalu memfokuskan pada data yang berkaitan dengan responsivitas pemerintah Kota Jambi dalam penanganan fenomena pengemis jumat berkah.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tertata yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga diperlukan untuk menyederhanakannya tanpa mengurangi isi. Dengan demikian, data harus disajikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang dilengkapi dengan teks naratif, bagan, foto, atau gambar lainnya untuk menjelaskan bagaimana responsivitas pemerintah kota Jambi dalam penanganan fenomena pengemis jumat berkah.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dan verifikasi adalah bagian terakhir dari proses analisis data penelitian kualitatif. Seseorang dapat menarik kesimpulan dengan membandingkan pernyataan subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar yang terkandung dalam penelitian. Untuk menemukan jawaban tentang

responsivitas pemerintah kota Jambi dalam penanganan pengemis jumat berkah, penelitian ini menarik kesimpulan dari berbagai hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder.

1.7.8 Keabsahan Data atau Triangulasi Data

Keabsahan data menunjukkan validitas data dan informasi yang dihasilkan, yang menunjukkan bahwa semua data dan informasi telah dikumpulkan dengan teliti dan menghasilkan informasi yang akurat. Menurut Norman K. Denkin, triangulasi atau keabsahan data adalah proses mengkaji dengan menggunakan beberapa metode untuk melihat fenomena yang sama dari beberapa sudut pandang berbeda (Susanto et al., 2023). Untuk pengujian kebenaran data, ada 4 jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber merupakan jenis triangulasi yang memanfaatkan berbagai sumber data berbeda dalam sebuah penelitian.
- b. Triangulasi Peneliti yaitu melibatkan beberapa peneliti dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda dalam satu penelitian.
- c. Triangulasi Metode yaitu meningkatkan keabsahan hasil penelitian dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan dan analisis data.
- d. Triangulasi Teori merupakan penggabungan teori atau perspektif yang berbeda untuk meningkatkan analisis data dan memperkuat hasil penelitian.

Berdasarkan beberapa triangulasi diatas, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data, melalui membandingkan dan

mengecek tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui metode kualitatif dengan menggunakan berbagai alat dan waktu yang berbeda.